RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

DINAS PMD

KABUPATEN NGANJUK



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD, merupakan salahsatu landasan dalam merumuskan dan menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung program-program prioritas Daerah.

Pembangunan desa-desa dan kawasan perdesaan juga telah menumbuhkan simpul - simpul pertumbuhan baru. Adapun status desa di Kabupaten Nganjuk hingga tahun 2024 sejumlah 79 desa berstatus desa mandiri, 175 berstatus desa maju. 10 Berstatus Berkembang Dengan skor Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,78191 target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 0,7869 dengan persentase realisasi capaian sebesar 99,37%. Adanya regulasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 9 Tahun 2023 tentang Indeks Desa yang telah mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2026 Tentang Indeks Desa Membangun.

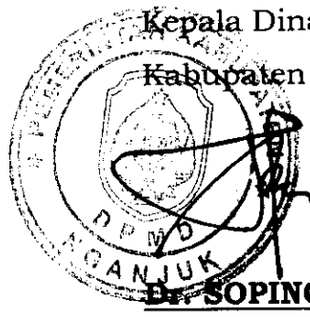
Yang menjadikan salah satu concern dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten nganjuk yang akan di laksanakan pada triwulan iii tahun anggaran 2025, pembangunan perdesaan akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan keunggulan, kolaboratif dan daya saing dengan mengoptimalkan tatakelola pemerintahan desa, aspek lingkungan, ekonomi, sosial, layanan dasar dan aksesbilitas desa.

kami menyadari bahwa tanpa dukungan stakeholder lainnya, maka tidak akan mencapai sasaran yang optimal dari target yang ditetapkan pada renstra ini.

Nganjuk, September 2025

Kepala Dinas PMD

Kabupaten Nganjuk,



Dr. SOPINGI, A.P, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL..... V
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1 LATAR BELAKANG 1
2 LANDASAN HUKUM..... 2
3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 9
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarak Dan Desa..... 9
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 9
B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SDM 15
C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18
D. Kelompok Sasaran Layanan 26
E. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Pelayanan..... 34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 35
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 35
b. Isu Strategis..... 35
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.... 45
3.1. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 45
3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52

4.1. Rencana Program 52

4.2. Rencana Kegiatan 67

4.3. Uraian Subkegiatan dan Pendanaan Beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif 70

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah 85

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 86

BAB V. PENUTUP 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknik Menimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa 37

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Pemerintah Kabupaten Nganjuk..... 47

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pember dayaan Masyarakat dan Desa 51

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD Pemerintah Kabupaten Nganjuk 53

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk..... 68

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk 71

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah kabupaten Nganjuk 85

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Renstra PD Pemerintah Kabupaten Nganjuk 86

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Renstra Pemerintah Kabupaten Nganjuk 87

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dan seiring dengan terpilihnya kepala daerah baru, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan perumusan / pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk untuk lima tahun mendatang.

Dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2029; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2025 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyuusunan Rancangan Awal; (3) Penyuusunan Rancangan (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memiliki keterkaitan dengan Dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Deterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

29. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2025.
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SDM;
C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
D. Kelompok Sasaran Layanan;
E. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Pelayanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ; dan
b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1. Rencana Program ;

4.2. Rencana Kegiatan ;

4.3. Uraian Subkegiatan dan Pendanaan Beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif ;

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah;

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyaraat dan Desa.

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. pembinaan aparatur;
5. pengelolaan urusan kepegawaian;
6. pembinaaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa yang berkaitan dengan utusan utusannya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang penataan desa dan kerjasama desa.

Bidang penataan dan kerjasama desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
2. Pelaksanaan Kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
4. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerjasama desa ; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan dengan tugas.

c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan desa;

3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
4. Penyelenggaraan Evaluasi Atas Pelaksanaan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang administrasi pemerintahan desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
4. pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan, aset dan ekonomi desa.

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, asset dan ekonomi desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
4. Pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

LAMPIRAN XI

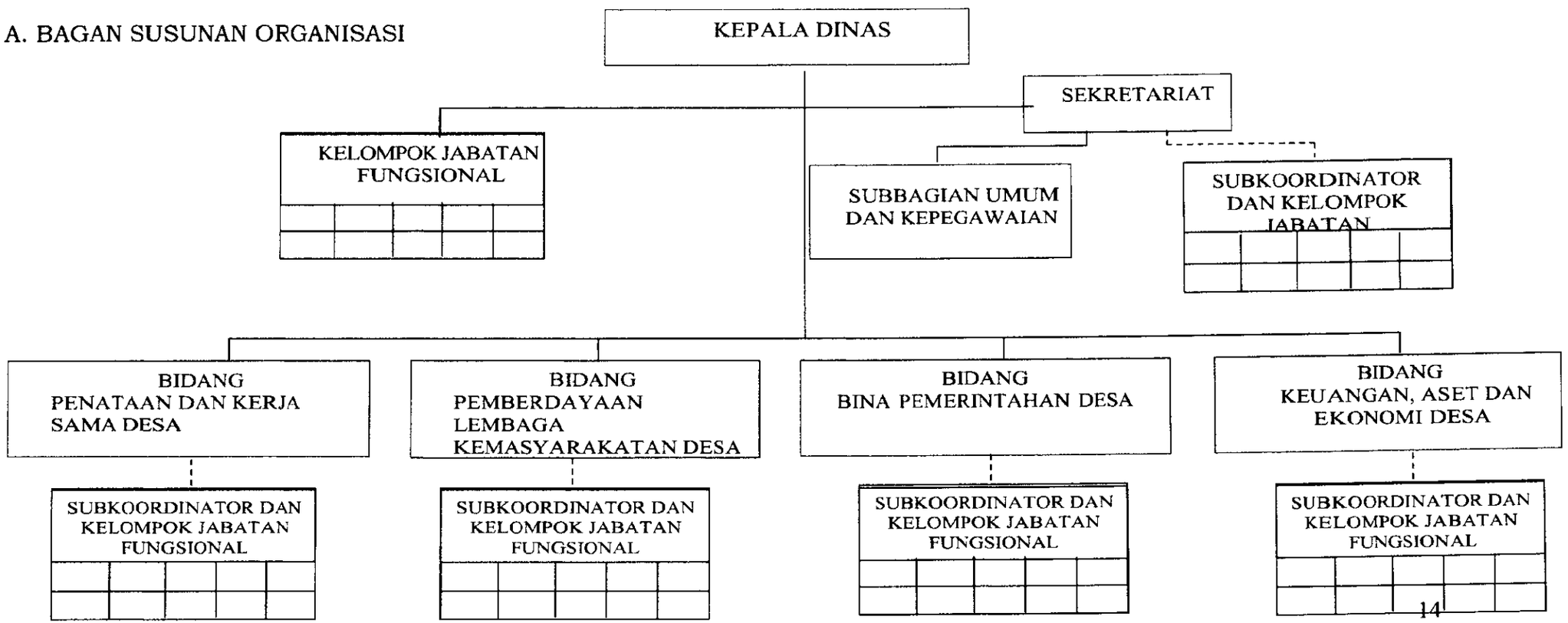
PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komposisi Jumlah SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, didukung karyawan/ karyawati ASN sebanyak 30 (tiga puluh empat) orang pegawai yang terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Jenis Kelamin
   - Laki-laki : 15 Orang
   - Perempuan : 15 Orang
2. Berdasarkan kepangkatan/ golongan
   - Golongan IV : 6 Orang
   - Golongan III : 13 Orang
   - Golongan II : 7 Orang
   - P3K GOLONGAN 9 : 1 Orang
   - P3K GOLONGAN 7 : 2 Orang
3. Berdasarkan tingkat pendidikan
   - Magister/ S2 : 7 Orang
   - Sarjana/ S1 : 13 Orang
   - Sarjana Muda/ D3 : 2 Orang
   - SMA/ Sederajat : 8 Orang

b. Tenaga Administrasi : 6 Orang

c. Sopir : 2 Orang

d. Penjaga kantor : 2 Orang

e. Sekber : 4 Orang

Kemampuan petugas (aparatur) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk secara kuantitatif kurang memadai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang sehingga sering terjadi over load beban kerja yang akhirnya mengakibatkan kinerja OPD kurang optimal. Penempatan petugas (aparatur) juga belum bisa memenuhi harapan dari rencana pemerintah atas penempatan pegawai dalam setiap OPD. Masih banyak petugas (aparatur) yang penempatannya belum sesuai dengan jabatan atau bidang ilmu. Sehingga akan banyak berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan perlu adanya penyesuaian komposisi petugas (aparatur) Dinas PMD sesuai dengan beban kerja yang ada dan penempatan

petugas yang cukup memadai dan berkompetensi pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.

Sarana dan Prasana

Dinas PMD memiliki 2 gedung kantor. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD.

Sarana dan prasarana Dinas PMD menurut data inventaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2025		
			Jml	Kondisi	
				B	R
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		2	1	1
2.	Station Wagon	Avanza	1	1	
		APV Suzuki	3	3	
3.	Brankas		2	2	
18.	Lemari Kayu		2	2	
19.	Rak Kayu		5	5	
20.	Meja Kayu		53		53
21.	Kursi Kayu/Rotan/ Bambu		2	2	
22.	Meja Rapat		1		1
26.	Kursi Rapat	ECERO	34	34	
28.	Kursi Putar	Verona	3	3	
31.	Focusing screen/Layar LCD Proyektor		1	1	
32.	Meja Tulis ½ biro		8	8	
33.	Meja Kerja 1 biro	Korden	4	4	
34.	CCTV	hilook	1	1	
35.	LCD Monitor	Polytron	2	2	
		Panasonic	1	1	
36.	Lemari Es	National	2	2	
37.	AC Unit	LG	1	1	
		Panasonic	6	6	
		Polytron	2	2	
38.	AC Split	Daikin	2	2	
		Panasonic	1	1	
40.	Televisi	LG	1	1	
		TV Android Polytron	2	2	
			1	1	

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun 2025		
			Jml	Kondisi	
				B	R
41.	Sound System	Speaker aktif Mini Mixer	1	1	
		Roadmaster 212	1	1	
		Polytron	2	2	
	Lap top	Asus, Intel care i3, hp Acer Polytron	35	29	6
	Meja Kerja Pejabat Esselon III		1	1	
	Meja Kerja Pejabat Esselon IV		1	1	
42.	LCD MONITOR	Polytron	2	2	
43.	Microphone	Zeta Pra Platinum	1	1	
44.	PC Unit	Rakitan	2	2	
		Distop	2	2	
45.	Note Book	Axioo	1	1	
46.	Printer	Canon G3010	3	3	
		HP LASER MFP 137PNW	2	2	
		HP	1	1	
		Epson	8	8	
48.	Meja Kerja Pejabat Eslon II		1	1	
49.	POWER Supply	Prolink pro 803ERS	1	1	
50.	Papan Nama Instansi	Papan Nama Instansi PKK	1	1	
51.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		1	1	
	Kursi Kerja		2	2	
	Rak Buku		3	3	
52.	Rak Buku		3	3	
55.	Pesawat Telephone	Panasonic	1	1	
56.	Faximili	Revo Duo 158	1	1	
59.	Sofa	Haneda	1	1	
66	LCD PROYEKTOR	Ben Q, Panasonik	3	3	
67	Meja Tamu Kayu Jati	-	1	1	
68	Meja Resepsionis Kayu Jati		1	1	
69	GENSET	BADJA	1	1	
	Monitor	LG	1	1	
	Komputer All in One	Acer	1	1	
	Korden	Kain	1	1	

Sumber Data : Infentaris Barang Dinas PMD.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, sampai saat ini belum ada indikator urusan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan di Dinas PMD tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi. Oleh karena itu guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas PMD dalam menentukan indikator kinerjanya didasarkan pada LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi, serta Pendanaan Pelayanan Dinas PMD.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2030	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif				100					100					100%				
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif				92,8					100					110%				
3	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100					100					100%				
4	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik				100					100					100%				
1	Survey Kepuasan Masyarakat					72%	72%	72	78		78 %	83%	83,7	73		108 %	115 %	116	94%
2	Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa					24%	24%	24%	24%		24%	27%	25%	27,64%		100%	112%	104%	123%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2030	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan					15%	15%	43%	87%		15%	43%	43%	87%		100%	286%	100%	100%
4	Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa					100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya Diberdayakan					32%	32%	32%	30%		32%	32%	35%	30%		100%	100%	109%	100%

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NGANJUK

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	287.817.200					266.055.183					0.92	0.96					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	305.219.300					289.892.292					0.94	0.97					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.400.000		-			2.600.000					0.76						
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.500.000					17.061.000					0.97	0.98					
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-		-			-		-			0	0.68	-				
Prograam Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partipasi Masyarkat dalam Pembangunan Desa	195.846.400					184.385.325					0.94						
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	305.000.000		-			31.408.460		-			0.10	0.9	-				
Program Peningkatan Patisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	195.000.000		-			364.912.430		-			1.87	0.92	-				
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.070.000.000		-			177.717.175		-			0.17	0.86	-				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program TataKelola Pemerintah Desa	204.113.000	-				169.850.435	-				0.83	-					
Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	-	-	-			-	-	-			-	-					
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	239.796.820	-				210.714.735	-				0.87-	-					
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	609.096.400	-				573.748.360	-				0.94	-					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		4.804.324.700	5.906.481.798	5.617.302.671	5.678.364.969		4.083.890.930	5.595.027.986	5.021.996.265	5.451.070.674		0,85	0,95	0,89	0,96		
PROGAM PENATAAN DESA		0	160.800.100	117.600,000	165.000.000		0	147.159.035	112.818.050	135.626.498		0,00	0.91	0,96	0,82		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		56.220.000	199.000.000	194.835.000	161.828.000		51.636.679	187.973.368	191.125.789	150.267.796		0.91	0,95	0,98	0,93		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		3.565.158.546	5.019.383.500	5.367.507.624	5.587.920.911		2.566.449.366	3.527.754.951	5.096.057224	5.365.595.355		0,72	0,70	0,95	0,96		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1.240.032.600	633.325.000	680.700.000	797.722.350		811.354.648	569.473.277	654.954.631	752.017.036		0.65	0.90	0,96	0,94		

IKHTISAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) KABUPATEN NGANJUK

Dasar Pelaksanaan :

1. PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
3. Kepmendesa PDTT No. 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Definisi :

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUM Desa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Untuk memperoleh status badan hukum, BUM Desa melakukan pendaftaran BUM Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa yang diatur dengan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, hingga diterbitkan sertifikat badan hukum BUM Desa.

Perkembangan Status Hukum BUM Desa di Kabupaten Nganjuk

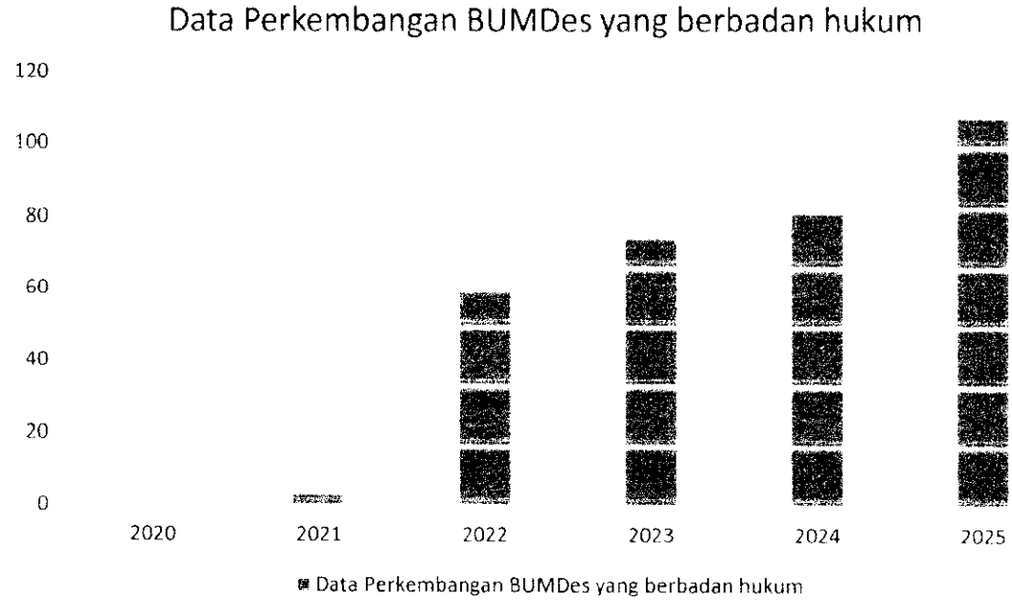
Jumlah seluruh BUM Desa di Kabupaten Nganjuk sebanyak 264 BUM Desa

1. Pada Tahun 2020 BUM Desa yang telah berbadan hukum **NIHIL**
2. Tahun 2021 jumlah BUM Desa yang telah berbadan hukum sebanyak 3 BUM Desa (0,01%)
3. Tahun 2022 jumlah BUM Desa yang telah berbadan hukum bertambah 56 menjadi 59 BUM Desa (22,35 %)
4. Tahun 2023 jumlah BUM Desa yang telah berbadan hukum bertambah 15 menjadi 74 BUM Desa (28,03%)

5. Tahun 2024 jumlah BUM Desa yang telah berbadan hukum bertambah 7 menjadi 81 BUM Desa (30,68%)
6. Tahun 2025 jumlah BUM Desa yang telah berbadan hukum bertambah 26 menjadi 107 BUM Desa (40,53%)

Perkembangan status badan hukum BUM Desa agak lambat disebabkan antara lain:

1. Pengurus BUM Desa tidak atau kurang aktif dan tidak adanya dukungan dari Pemerintah Desa
2. Kurangnya pengelolaan BUM Desa secara professional bahkan usaha tidak berjalan
3. Organ BUM Desa (Penasehat, Pengawas dan Pelaksana operasional) tidak atau kurang menjalankan tugas sebagaimana tupoksinya.
4. Terdapatnya rencana pergantian pengurus lama
5. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan BUM Desa dalam pengembangan BUM Desa
6. Pemahaman pengetahuan atau informasi terkait pendaftaran badan hukum BUM Desa



Definisi Indeks Desa Membangun (IDM)

Dasar Pelaksanaan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 2 Tahun 2016, Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang disusun berdasarkan tiga indeks utama:

Indeks Ketahanan Sosial (IKS): Mengukur ketahanan sosial masyarakat desa. Indikatornya mencakup pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE): Mengukur ketahanan ekonomi masyarakat desa. Indikatornya meliputi keragaman produksi, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi.
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL): Mengukur ketahanan lingkungan hidup masyarakat desa. Indikatornya mencakup kualitas lingkungan, tanggap bencana, dan ketersediaan ruang terbuka.

Bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan nasional, Daerah, dan Desa, perlu disusun indeks Desa maka ditetapkan Peraturan Menteri Desa tentang Indeks Desa Nomor 09 Tahun 2024. Dengan Komponen Indek Desa yang terdiri dari 6 Dimensi:

1. Dimensi layanan dasar yang terdiri dari sub dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Utilitas dasar.
2. Dimensi sosial yang terdiri dari sub dimensi aktivitas; dan fasilitas masyarakat.
3. Dimensi ekonomi yang terdiri dari sub dimensi : Produksi Desa dan fasilitasi pendukung Ekonomi.
4. Dimensi lingkungan yang terdiri dari sub dimensi : Pengelolaan lingkungan dan penanggulangan Bencana.
5. Dimensi aksesibilitas yang terdiri dari sub dimensi : Kondisi akses jalan dan Kemudahan Akses.
6. Dimensi tata kelola pemerintahan Desa yang terdiri dari sub dimensi : Kelembagaan dan pelayanan desa serta Tata kelola keuangan Desa.

DATA PERKEMBANGAN INDEKS DESA MEMBANGUNAN



D. Kelompok Sasaran Layanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Capaian Kinerja**	**Masyarakat Pemanfaat**
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	

1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerinttahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	➢ Aparatur Pelaksanaan bimtek ➢ Masyarakat Desa Manfaat layanan Desa
2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa.	➢ Aparatur Pelaksanaan bimtek ➢ Masyarakat Desa
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		**Indikator Capaian Kinerja**	➢ **Masyarakat Pemanfaat**
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	➢ Masyarakat Desa Manfaat Pembangunan Desa
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa	➢ Aparatur Pelaksanaan bimtek ➢ Masyarakat Desa Manfaat Program
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	➢ Aparatur Pelaksanaan bimtek ➢ Masyarakat Desa Manfaat layanan Desa
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	➢ Pengelola BUM DesaPenerima Bintek ➢ Masyarakat Desa Pemanfaat layanan BUMDesa
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan	Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan,	➢ Kapasitas Kelembagaan Pemdes

	dan Pemberhentian Kepala desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	➢ Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	➢ Kapasitas SOTK Desa ➢ Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan
9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Propil Desa	➢ Dukungan Data Informasi Desa ➢ Masyarakat Desa Pemanfaat Layanan Informasi dan Program
10	Fasilitasi Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	➢ Dukungan Data Aset Desa Termanfaatkan ➢ Pemanfaat Pengelola Aset
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		**Indikator Capaian Kinerja**	➢ **Masyarakat Pemanfaat**
11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	➢ Anggota BPD Pelaksana Desa Pelaksana ➢ MAsyarakat Desa Aspiratif tersalur
12	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	➢ Aparatur Pemerintah Desa Pelaksana ➢ Akuntabilitas Publik Masyarakat desa
13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	JumlaH dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa	➢ Peran Serta Pemdes, LKD dan Masyarakat Desa dalam Usaha Perkembangan ➢ Partisipasi Masayarat Desa dalam Penyelenggaraan Pemdesa

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM		Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembaannya diberdayakan	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat		Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan	
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat	➢ Pengurus Lembaga Desa Terbina Administr.asi ➢ Masyarakat Penerima Manfaat Kegiatan Lembaga dan LKD Desa
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna),	➢ Pengurus Lembaga Desa Terbina Kegiatan ➢ Masyarakat Penerima Manfaat Kegiatan Lembaga dan LKD Desa

	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Taruna), Lembaga LPM, dan Karang LPM, dan Karang Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	➢ Masyarakat/Lembaga Usaha Ekonomi Desa ➢ Masyarakat Penerima Manfaat Pengembangan Usaha
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfataan teknologi Tepat Guna	➢ Masyarakat Pemanfaat ➢ Masyarakat Pemanfaat Program
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	➢ Masyarakat Pemanfaat ➢ Masyarakat Pemanfaat Program
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		**Indikator Capaian Kinerja**	➢ **Masyarakat Pemanfaat**
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	➢ Pengurus Lembaga PKK Desa, Kecamatan dan kabupaten.

	Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	➢ Masyarakat Pemanfaat 10 program Pokok PKK
PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Desa Dengan Penataan Sesuai Stardar Ketentuan	
Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa	
1	Pembentukkan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status	Jumilah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	➢ Pemerintah Desa ➢ Masyarakat Desa pemanfaat pembentukan penghapusan, status desa
2	Fasilitasi Tata Penataan Wilayah	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	➢ Pemerintah Desa ➢ Masyarakat Wilayah perbatasan Desa ➢ Masyarakat Pemanfaat Lahan batas Desa
3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	➢ Pemerintah Desa ➢ Masyarakat Partisipasi Pembangunan Swadaya
4	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	➢ Pemerintah Desa dan Masyarakat Peneriman Manfaat Pembangunanntah Desa ➢ DPMD Propinsi atas fasilitasi Pelaksanaan program BK Propinsi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Capaian Kinerja	Masyarakat Pemanfaat
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama Secara Aktif	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan Pembangunan	
1	Fasilitasi Kerjasama Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	➢ Pemerintah Desa ➢ Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Hasil Kerjasama
2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	➢ Pemerintah Desa ➢ Pihak ketiga Patner Kerjasama ➢ Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Hasil Kerjasama
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	➢ Pemerintah Desa dapat Mengembangan Kebijakan ➢ Masyarakat Pemanfaat Pembangunan Kawasan ➢ Masyarakat PemanfaatPotensi Dampak Pembangunan

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PMD sesuai tugas dan fungsi sebagai salah satu OPD di Kabupaten Nganjuk, antara lain :

Tantangan

1. Kurangnya pemahaman dan kemauan pemerintah desa dalam memfungsikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Sebagian besar Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa belum memahami tupoksinya
3. Kurangnya penjabaran regulasi terkait lembaga kemasyarakatan desa baik peran, indicator aktif, dll
4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa
5. Kurangnya inovasi bentuk pemberdayaan masyarakat
6. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap regulasi
7. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku
8. Kurang berfungsinya peran Badan Permusyawaratan Desa
9. kurang tertibnya administrasi desa
10. kurangnya pembinaan tata kelola pemerintahan desa
11. kurangnya motivasi mengikuti evaluasi tingkat perkembangan desa
12. Pelaksanaan program dan kegiatan di desa belum sesuai sasaran
13. Administrasi keuangan desa yang belum optimal dan belum tepat waktu dalam pelaporan
14. Aset desa belum didata dan dikelola dengan baik
15. Terdapat permasalahan aset desa yang belum tertangani

16. Pengadaan barang dan jasa desa belum dipahami sepenuhnya oleh pelaksana kegiatan
17. Sumber daya desa, potensi desa dan teknologi tepat guna belum digali dan dimanfaatkan secara optimal
18. Lembaga ekonomi masyarakat (BUM Desa, UPK, Pokmas PK2 Jalin Matra) belum dikelola secara optimal

Peluang

a. Kebijakan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat
b. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara global
c. Potensi swadaya gotong royong dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Nganjuk
d. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) geografis Kabupaten Nganjuk
e. Aksebilitas yang terbuka dengan selesainya pembangunan jalan tol Trans Jawa dan rencana pembangunan bandara Kediri pangsa pasar wisatawan dari Surabaya, Solo, Madiun dan sekitarnya terbuka lebar
f. Berkembangnya wisata di Sarangan dan Tawangmangu menjadi peluang Kabupaten Nganjuk sebagai alternatif tujuan wisata
g. Besarnya potensi keindahan alam dan budaya Kabupaten Nganjuk yang belum dieksplore secara maksimal
h. Terdapat 17 Bumdesma Transformasi ex PNPM yang sudah berbadan hukum yang memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat sehingga ikut menurunkan tingkat pengangguran di desa.

E. Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberian Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD didukung oleh SDM dari aparatur pemerintahan desa serta Tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dari Kementrian Desa PDTT. Aparatur Pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa/ Kelurahan dan Perangkat Desa. Jumlah Kepala Desa Kabupaten Nganjuk 252 Orang, Kosong 10 Orang, Proses Hukum 2 Orang, Sekretaris Desa Sebanyak 240 orang, Kosong 24 Orang, perangkat

Desa sebanyak 2.501Orang, Kosong 156 Orang, Tenaga pendamping sebanyak 254 orang, Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) 6 Orang, Pendamping Desa (PD) 52 orang, Pendamping Lokal Desa (PLD) 60 orang, Tenaga Sekretariat Bersama 2 orang, dan Pendamping program Jatim Puspa 1 orang Konsultan Desa Berdaya 2 orang.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PMD

Permasalahan Permasalahan_yang muncul terkait tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain sebagi berikut :

1. Belum tepat Waktu Penyusunan perencanaan dan Penganggaran Desa
2. Belum Tepat Sasaran antara kebutuhan Prioritas dengan Keberadaan Anggaran Desa
3. Proses Pelaksanaan kegiatan yang belum Optimal antara Perencanaan dan pengganggaran Desa.
4. Belum Transparan dan akuntabelnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
5. Belum Tepat waktu Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaranan Pemerintah Desa
6. Belum tertibnya administrasi pelayanan maupun pengelolaan Keuangan Desa
7. Belum Optimalnya pengembangan usaha ekonomi Desa Untuk menambah pendapatan asli desa.
8. Belum Optimalnya koordinas, Sinergi dan kerja sama antar desa.
9. Belum Adanya Regulasi yang Mendasari APBDes terhadap Koperasi Merah Putih.

b. ISU STRATEGIS :

Dalam Penentuan Isu-isu Strategis dalam lingkungan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Untuk melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nganjuk, Perlu di kedepankan kerangka berpikir positif yang dapat menetukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- Belum Optimalnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan tertib pada Aspek Perencanaan, Penganggaran Pengelolaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, dan tata kelola Administrasi Pemerintahan Desa Lainnya.
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dengan adanya Kebijakan pendirian Koperasi Merah Putih.

Tabel 2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemberdayaan Masyarakat	**Kelembagaan Desa**	**Kementerian Dalam Negeri**	**Perubahan iklim**	**Pemanfaatan Dana Desa yang efektif**	**Program Desa Berdaya**	1. **Penguatan kapasitas kelembagaan desa**
✓ Keberadaan kader pemberdayaan desa dan kelembagaan desa	• Masih rendahnya kapasitas aparatur desa	➢ Penataan kewenangan desa dan regulasi pelaksanaan pemerintahan desa	✓ Penguatan kapasitas desa menghadapi bencana dan perubahan iklim	✓ Peningkatan kapasitas penggunaan dana desa secara transparan	✓ Sinkronisasi kegiatan dengan program prioritas	Masih banyaknya aparatur desa yang belum kompeten secara teknis dan administratif

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
✓ Kegiatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa	• Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa	➢ Tata kelola keuangan dan aset desa yang akuntabel	**SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)**	**Digitalisasi pemerintahan desa**		2. **Optimalisasi pemanfaatan dana desa**
Desa dan Kawasan Perdesaan	**Keuangan dan Aset Desa**	**Kementerian Desa PDTT**		Pengembangan SID yang terintegrasi		Perlu peningkatan perencanaan partisipatif dan pengawasan masyarakat
✓ Jumlah desa yang besar (jumlah desa	• Kurang optimalnya tata kelola keuangan	➢ Transformasi pengelolaan dana desa	✓ Integrasi data SDGs Desa dalam	**Reformasi birokrasi**		3 **Revitalisasi BUMDes dan BUMDesma**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
di Nganjuk mencapai >250 desa)	dan aset desa	untuk penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan desa wisata dan kawasan perdesaan	perencanaan pembangunan			
✓ Wilayah pertanian yang luas	• Minimnya pemanfaatan aset desa untuk kegiatan produktif	➢ Pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa		✓ Penataan kelembagaan desa yang efektif dan efisien		Banyak BUMDes belum aktif, perlu penguatan kelembagaan,

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						legalitas, dan inovasi usaha
✓ Potensi pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan		➢ Pengembangan desa wisata dan kawasan perdesaan				4. **Penguatan Sistem Informasi Desa dan Data Terpadu**
BUMDes/BUMDesma	**BUMDes/BUMDesma**	**Bappenas**				Perlu peningkatan kualitas dan integrasi data IDM, SDGs Desa, dan basis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						data kesejahteraan lainnya
✓ Banyaknya BUMDes dan BUMDesma yang aktif	• Masih banyak BUMDes tidak aktif atau belum berkembang	➢ Prioritas pembangunan perdesaan dalam RPJMN 2025–2029				5.**Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa**
✓ Potensi pengembangan unit usaha simpan pinjam dan usaha	• Permasalahan legalitas dan pengelolaan SDM	➢ Penguatan sistem monitoring berbasis data digital				Meningkatkan keterlibatan warga desa dalam musyawarah dan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
produktif lainnya						pengawasan pembangunan
Lembaga Adat dan Sosial kemasyarakatan	**Pemberdayaan Masyarakat**	**Kemenkeu/Kemenkop UKM**				6.**Pengembangan potensi lokal berbasis kawasan**
• Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu	• Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah	➢ Penguatan BUMDes sebagai entitas ekonomi resmi				Penguatan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan local

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Nilai-nilai kearifan lokal yang masih kuat	• Minimnya kolaborasi antar unsur masyarakat	➢ Pengembangan ekosistem UMKM perdesaan				7. **Tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan**
Data dan Informasi Desa	**Data dan Informasi Desa**					Mendorong akuntabilitas pelaporan dan efisiensi anggaran pemerintahan desa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DP	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
✓ Sistem informasi desa (SID) yang sudah berjalan	• Kualitas data IDM dan data SDGs Desa masih belum valid					
✓ Dukungan terhadap pemutakhiran data IDM dan data SDGs Desa	• Keterbatasan SDM dalam pengelolaan sistem informasi desa					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang dibentuk sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di Perdesaan dan Kelurahan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk periode Tahun 2025-2029, maka diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2025-2029 yang dapat dijabarkan dalam Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

VISI : *"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT".*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya visi dan misi tersebut terutama di **MISI ke_ 5** yaitu : ***" MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL "***

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk pada Renstra adalah ***"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa"*** dengan Indikator Tujuan "***Indeks Desa"***

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu ***"Meningkatnya Kemandirian Desa "***. Dengan Indikator Sasaran ***"Persentase Desa Mandiri (%)"***

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, Sebagaimana Tabel 3 .3.

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BAS LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
- Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Desa (Indeks)	0,78191	0.7810	0.7812	0.7814	0.7816	0.7818	0.7820	
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	29.92	45.5	47,3	49,2	51	53	54.9	

- Strategi Perangkat Daerah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029.

  Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program –program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran suatu organisasi, adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

  1. Penguatan penataan administrasi pemerintahan desa yang meliputi aspek penamaan dan kodefikasi desa, aspek kewilayaan, kewenangan desa dan produk hukum desa serta manajemen pemerintahan desa;
  2. Penguatan desa melalui kerjasama antar desa;
  3. Penguatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan tata kelola pemerintahan desa;
  4. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinaas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Program Unggulan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran Mendorong Pemberdayaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama dalam Pengembangan Ekonomi Mayarakat serta Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat	**Program Unggulan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran** Pelaksanaan kerja sama dengan Otoritas jasa keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan pengendalian Keuangan sehingga BUMDesMa Tetap berjalan Lancar serta Menggerakkan Pertumbuhan BUMDesa sebagai wahana peningkatan Pendapatan Asli Desa	**Program Unggulan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran** Mendorong pengembangan Unit usaha BUMDESMA dalam bentuk Unit Usaha. Serta Pengembangan BUMDes dengan menggali potensi Desa dan Penguatan Para pelaksana BUMDes	**Program Unggulan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran** Penguatan para penyelenggara BUMDesMa, Asosiasi, Sekber Maupun Pelaku BUMDesMA serta Mendorong Tiga (3) Kecamatan yang belum memiliki BUMDesMa (Kecamatan Nganjuk, KecamatanKertosono dan Kecamatan Bagor) serta Melaksanakan Pelatihan dan	**Program Unggulan 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran** Evaluasi dan Mengoptimalkan Unit Usaha di BUMDesMa Serta Monitoring terhadap BUMDes salah satu sumber Pendapatan Asli Desa terhadap penggalian potensi desa.

			Pembinaan para Usaha Pelaku Masyrakat.	
Program Unggulan 15 Peningkatan ADD dan Kesejahteraan Kelembagaan Desa atau Kelurahan (RT, RW, BPD/LPM DAN KADER Mempertahankan Alokasi Dana Desa untuk Alokasi Kebutuhan Dasar dan Muwujudkan Pengembangan Alokasi Khusus	**Program Unggulan 15 Peningkatan ADD dan Kesejahteraan Kelembagaan Desa atau Kelurahan (RT, RW, BPD/LPM DAN KADER** Mempertahankan Alokasi Dana Desa untuk Alokasi Kebutuhan Dasar dan Penambahan Alokasi Khusus untuk jaminan Ketenagaakerjaan melalui BPJS Ketenaga kerjaan	**Program Unggulan 15 Peningkatan ADD dan Kesejahteraan Kelembagaan Desa atau Kelurahan (RT, RW, BPD/LPM DAN KADER** Memasukkan Alokasi Proporsional di luar Alokasi Dasar dan Alokasi Khusus	**Program Unggulan 15 Peningkatan ADD dan Kesejahteraan Kelembagaan Desa atau Kelurahan (RT, RW, BPD/LPM DAN KADER** Penguatan ADD untuk Alokasi Kebutuhan Dasar, Alokasi Khusus dan Alokasi Proposional dengan Memberikan Penambahan Hak para Penyelenggara Pemerintah Desa	**Program Unggulan 15 Peningkatan ADD dan Kesejahteraan Kelembagaan Desa atau Kelurahan (RT, RW, BPD/LPM DAN KADER** Monitoring, evaluasi dan Penguatan ADD

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Dengan menerapkan norma standar, Prosedur dan Kriteria tersebut, diharapkan kualitas Pelayanan mutu pendidikan dan kesehatan dapat meningkat, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era Global	(M4) Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	✓ Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa ✓ Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa	
2	Dengan menerapkan norma standar, Prosedur dan Kriteria tersebut, diharapkan Pemerintah dapat meningkatkan Keberpihakan dalam pengembangan Ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyakat dan mengurangi kemiskinan.	(M5) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local	✓ Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa ✓ Pemanfataan Teknoli dan Inovasi ✓ Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program

Adapun Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penataan Desa.
3. Program Peningkatan Kejasama Desa.
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan. Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2025-2029 dan melalui analisa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

RENCANA STRATEGIS PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
- Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat daun Desa				Indeks Desa (Indeks)		
		Meningkatnya Kemandirian Desa			Persentase Desa Mandiri (%)		
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan		Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penetaan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
					Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Terjalinnya Kerjasama Desa yang Produktif dan Legal		Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa		Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa		Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba (%)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya tingkat keaktifan BUM Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	

4.2 Rencana Kegiatan.

Untuk mendukung Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa direncanakan dengan Kegiatan sebai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan :

   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penataan Desa.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

3. Program Peningkatan Kejasama Desa.
   - Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
   - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat HukumAdat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENCANA STRATEGIS PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					13.536.316.976,00		15.182.678.674,00		16.510.308.541,00		17.961.929.425,00		19.726.582.568,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.650.216.976,00		8.615.748.674,00		9.624.958.541,00		10.421.929.425,00		11.479.077.568,00	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,15	75	76	7.650.216.976,00	77	8.615.748.674,00	78	9.624.958.541,00	79	10.421.929.425,00	80	11.479.077.568,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					130.000.000,00		143.000.000,00		157.300.000,00		173.250.000,00		190.605.000,00	
Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	27	24	25	130.000.000,00	28	143.000.000,00	31	157.300.000,00	34	173.250.000,00	37	190.605.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					205.100.000,00		225.630.000,00		237.900.000,00		262.700.000,00		281.200.000,00	
Terjalinnya kerjasama desa yang produktif dan legal	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	70	87	87	205.100.000,00	87	225.630.000,00	87	237.900.000,00	87	262.700.000,00	87	281.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI					4.504.000.000,00		5.079.800.000,00		5.297.350.000,00		5.831.650.000,00		6.418.450.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa	Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik (%)	70	75	78	3.115.000.000,00	80	3.426.500.000,00	82	3.769.200.000,00	85	4.146.000.000,00	87	4.560.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	N/A	71.93	77.7	1.185.000.000,00	79.62	1.428.800.000,00	81.54	1.281.150.000,00	83.46	1.413.950.000,00	85.38	1.558.850.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya kemandirian ekonomi desa	Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba (%)	15	20	25	204.000.000,00	30	224.500.000,00	35	247.000.000,00	40	271.700.000,00	45	298.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.047.000.000,00		1.118.500.000,00		1.192.800.000,00		1.272.400.000,00		1.357.250.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaann ya diberdayakan (%)	28	45	37	1.047.000.000,00	42	1.118.500.000,00	47	1.192.800.000,00	52	1.272.400.000,00	57	1.357.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
TOTAL KESELURUHAN					13.536.316.976,00		15.182.678.674,00		16.510.308.541,00		17.961.929.425,00		19.726.582.568,00	

4.3. Uraian Subkegiatan dan Pendanaan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif :

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2025-2029 dan melalui analisa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dan Untuk mendukung Pelaksanaan Subkegiatan dan pendanaan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu Indikatif sebagai berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				13.536.316.976		15.182.678.674		16.510.308.541		17.961.929.425		19.728.582.568		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.650.216.976		8.615.748.674		9.624.958.541		10.421.929.425		11.479.077.568		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	74,15	76	7.650.216.976	77	8.615.748.674	78	9.624.958.541	79	10.421.929.425	80	11.479.077.568	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.000.000		45.600.000		50.200.000		55.220.000		60.750.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	18	41.000.000	18	45.600.000	18	50.200.000	18	55.220.000	18	60.750.000		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				41.000.000		45.600.000		50.200.000		55.220.000		60.750.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	18	41.000.000	18	45.600.000	18	50.200.000	18	55.220.000	18	60.750.000		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.668.000.000		6.234.900.000		6.858.480.000		6.929.238.000		7.622.226.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	31	5.648.000.000	31	6.212.800.000	31	6.834.080.000	31	6.902.388.000	31	7.592.626.000		
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.648.000.000		6.212.800.000		6.834.080.000		6.902.388.000		7.592.626.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	31	5.648.000.000	31	6.212.800.000	31	6.834.080.000	31	6.902.388.000	31	7.592.626.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	68	72	20.000.000	72	22.100.000	72	24.400.000	72	26.850.000	72	29.600.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				9.000.000		10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.400.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	9.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.400.000		
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				11.000.000		12.100.000		13.400.000		14.750.000		16.200.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	68	72	11.000.000	72	12.100.000	72	13.400.000	72	14.750.000	72	16.200.000		
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.296.976		13.526.674		14.879.341		16.367.275		18.004.003		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	31	12.296.976	31	13.526.674	31	14.879.341	31	16.367.275	31	18.004.003		
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				12.296.976		13.526.674		14.879.341		16.367.275		18.004.003		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	31	12.296.976	31	13.526.674	31	14.879.341	31	16.367.275	31	18.004.003		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				470.000.000		518.350.000		571.400.000		1.052.900.000		1.158.258.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	84.500.000	1	93.850.000	1	103.500.000	1	114.700.000	1	126.200.000		
	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan (paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000		12.000.000		13.200.000		15.000.000		16.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.200.000	1	15.000.000	1	16.500.000		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				71.000.000		78.850.000		87.000.000		96.000.000		105.600.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	71.000.000	8	78.850.000	8	87.000.000	8	96.000.000	8	105.600.000		
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.500.000		3.000.000		3.300.000		3.700.000		4.100.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.300.000	2	3.700.000	2	4.100.000		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	584	600	385.500.000	600	424.500.000	600	467.900.000	600	938.200.000	600	1.032.058.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000		4.000.000		4.400.000		4.850.000		5.400.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.400.000	12	4.850.000	12	5.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		385.000.000		423.500.000		889.350.000		978.258.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	584	600	350.000.000	600	385.000.000	600	423.500.000	600	889.350.000	600	978.258.000		
2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				32.000.000		35.500.000		40.000.000		44.000.000		48.400.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.000	3.000	32.000.000	3.000	35.500.000	3.000	40.000.000	3.000	44.000.000	3.000	48.400.000		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				488.000.000		734.800.000		953.300.000		1.073.650.000		1.196.200.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	4	488.000.000	4	734.800.000	4	953.300.000	4	1.073.650.000	4	1.196.200.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	52	36		35		35		36		35			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.13.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				120.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	120.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000		
2.13.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		250.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000		
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.500.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	52	36	100.000.000	35	110.000.000	35	121.000.000	36	133.100.000	35	146.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				68.000.000		74.800.000		82.300.000		90.550.000		99.700.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	4	68.000.000	4	74.800.000	4	82.300.000	4	90.550.000	4	99.700.000		
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.020.000		110.172.000		121.199.200		133.454.150		147.189.565		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	100.020.000	24	110.172.000	24	121.199.200	24	133.454.150	24	147.189.565		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				29.000.000		32.000.000		35.200.000		38.800.000		43.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	29.000.000	2	32.000.000	2	35.200.000	2	38.800.000	2	43.000.000		
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				68.500.000		75.400.000		82.950.000		91.300.000		100.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	68.500.000	24	75.400.000	24	82.950.000	24	91.300.000	24	100.500.000		
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.520.000		2.772.000		3.049.200		3.354.150		3.689.565		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	2.520.000	12	2.772.000	12	3.049.200	12	3.354.150	12	3.689.565		
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				870.900.000		958.400.000		1.055.500.000		1.161.100.000		1.276.450.000		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	870.900.000	20	958.400.000	20	1.055.500.000	20	1.161.100.000	20	1.276.450.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40		40		40		40		40			
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				325.500.000		358.100.000		394.000.000		433.400.000		476.750.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	7	325.500.000	7	358.100.000	7	394.000.000	7	433.400.000	7	476.750.000		
2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				3.700.000		4.100.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20	3.700.000	20	4.100.000	20	4.500.000	20	5.000.000	20	5.500.000		
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.000.000		47.300.000		53.000.000		58.300.000		64.200.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	43.000.000	40	47.300.000	40	53.000.000	40	58.300.000	40	64.200.000		
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				498.700.000		548.900.000		604.000.000		664.400.000		730.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	498.700.000	2	548.900.000	2	604.000.000	2	664.400.000	2	730.000.000		
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				130.000.000		143.000.000		157.300.000		173.250.000		190.605.000		
Meningkatnya Penataan Desa yang Legal, Efektif dan Berkelanjutan	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	27	28	130.000.000	29	143.000.000	31	157.300.000	34	173.250.000	37	190.605.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				130.000.000		143.000.000		157.300.000		173.250.000		190.605.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Penetaan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	23	10	130.000.000	10	143.000.000	10	157.300.000	10	173.250.000	10	190.605.000		
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	30	25		30		31		39		39			
	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	20	30		33		40		40		48			
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.700.000		29.400.000		
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.700.000	1	29.400.000		
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	20	30	50.000.000	33	55.000.000	40	60.500.000	40	66.550.000	48	73.205.000		
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa				30.000.000		33.000.000		36.300.000		40.000.000		44.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	30	25	30.000.000	30	33.000.000	31	36.300.000	39	40.000.000	39	44.000.000		
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				30.000.000		33.000.000		36.300.000		40.000.000		44.000.000		
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	23	10	30.000.000	10	33.000.000	10	36.300.000	10	40.000.000	10	44.000.000		
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				205.100.000		225.630.000		237.900.000		262.700.000		281.200.000		
Terjalinnya Kerjasama Desa yang Produktif dan Legal	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	70	87	205.100.000	87	225.630.000	87	237.900.000	87	262.700.000	87	281.200.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				205.100.000		225.630.000		237.900.000		262.700.000		281.200.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	3	2	205.100.000	2	225.630.000	2	237.900.000	2	262.700.000	2	281.200.000		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				100.900.000		111.000.000		112.000.000		124.200.000		136.700.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	10	100.900.000	10	111.000.000	10	112.000.000	10	124.200.000	10	136.700.000		
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				29.700.000		32.630.000		35.900.000		39.500.000		43.500.000		
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	10	29.700.000	10	32.630.000	10	35.900.000	10	39.500.000	10	43.500.000		
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				74.500.000		82.000.000		90.000.000		99.000.000		101.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	3	2	74.500.000	2	82.000.000	2	90.000.000	2	99.000.000	2	101.000.000		
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4.504.000.000		5.079.800.000		5.297.350.000		5.831.650.000		6.418.450.000		
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	71,93	77,7	1.185.000.000	79,62	1.428.800.000	81,54	1.281.150.000	83,46	1.413.950.000	85,38	1.558.850.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.504.000.000		5.079.800.000		5.297.350.000		5.831.650.000		6.418.450.000		
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	1	1.185.000.000	1	1.428.800.000	1	1.281.150.000	1	1.413.950.000	1	1.558.850.000		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentan Kepala Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentan Perangkat Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	264	264		264		264		264		264			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	80	264		300		320		350		390			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	528	528		528		528		528		528			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	264	264		264		264		264		264			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	225	230		235		240		245		250			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	21	21		21		21		21		21			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengkuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	80	500		700		800		900		1.000			
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				30.000.000		33.000.000		36.300.000		40.000.000		44.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	5	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	40.000.000	1	44.000.000		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				214.000.000		235.400.000		259.000.000		285.000.000		313.400.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	528	528	214.000.000	528	235.400.000	528	259.000.000	528	285.000.000	528	313.400.000		
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				55.000.000		61.000.000		67.100.000		73.850.000		81.300.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	264	264	55.000.000	264	61.000.000	264	67.100.000	264	73.850.000	264	81.300.000		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				77.000.000		84.700.000		93.200.000		102.500.000		112.750.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	80	500	77.000.000	700	84.700.000	800	93.200.000	900	102.500.000	1.000	112.750.000		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				297.000.000		400.000.000		150.000.000		165.000.000		185.000.000		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	1	297.000.000	1	400.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	185.000.000		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.300.000		80.650.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.300.000	1	80.650.000		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	264	264	45.000.000	264	50.000.000	264	55.000.000	264	60.500.000	264	66.550.000		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.400.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	225	230	100.000.000	235	110.000.000	240	121.000.000	245	133.100.000	250	146.400.000		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				132.000.000		145.200.000		160.000.000		175.900.000		193.500.000		
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	80	264	132.000.000	300	145.200.000	320	160.000.000	350	175.900.000	390	193.500.000		
2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				90.000.000		99.000.000		108.000.000		119.800.000		131.800.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	3	2	90.000.000	2	99.000.000	2	108.000.000	2	119.800.000	2	131.800.000		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				90.000.000		150.000.000		165.000.000		185.000.000		203.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	21	21	90.000.000	21	150.000.000	21	165.000.000	21	185.000.000	21	203.500.000		
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase BUMDes yang aktif dan menghasilkan laba (%)	15	25	204.000.000	30	224.500.000	35	247.000.000	40	271.700.000	45	298.900.000		
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.504.000.000		5.079.800.000		5.297.350.000		5.831.650.000		6.418.450.000		
Meningkatnya tingkat keaktifan BUM Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	40	66	204.000.000	79	224.500.000	92	247.000.000	106	271.700.000	119	298.900.000		
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				204.000.000		224.500.000		247.000.000		271.700.000		298.900.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	40	66	204.000.000	79	224.500.000	92	247.000.000	106	271.700.000	119	298.900.000		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Persentase desa dengan tata kelola keuangan yang baik (%)	70	78	3.115.000.000	80	3.426.500.000	82	3.769.200.000	85	4.146.000.000	87	4.560.700.000		
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.504.000.000		5.079.800.000		5.297.350.000		5.831.650.000		6.418.450.000		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	185	206	3.115.000.000	211	3.426.500.000	216	3.769.200.000	224	4.146.000.000	230	4.560.700.000		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				3.115.000.000		3.426.500.000		3.769.200.000		4.146.000.000		4.560.700.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	185	206	3.115.000.000	211	3.426.500.000	216	3.769.200.000	224	4.146.000.000	230	4.560.700.000		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.047.000.000		1.118.500.000		1.192.800.000		1.272.400.000		1.357.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan (%)	28	37	1.047.000.000	42	1.118.500.000	47	1.192.800.000	52	1.272.400.000	57	1.357.250.000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.047.000.000		1.118.500.000		1.192.800.000		1.272.400.000		1.357.250.000		
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	240	300	1.047.000.000	300	1.118.500.000	300	1.192.800.000	300	1.272.400.000	300	1.357.250.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	335	384		384		384		384		384			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	21	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	305	110		110		110		110		110			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	20	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	20	1		1		1		1		1			
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				205.000.000		225.500.000		248.000.000		272.800.000		300.000.000		
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	240	300	205.000.000	300	225.500.000	300	248.000.000	300	272.800.000	300	300.000.000		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.500.000		161.150.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	335	384	110.000.000	384	121.000.000	384	133.100.000	384	146.500.000	384	161.150.000		
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				38.500.000		43.000.000		47.300.000		52.100.000		57.400.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	21	2	38.500.000	2	43.000.000	2	47.300.000	2	52.100.000	2	57.400.000		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				38.500.000		43.000.000		47.300.000		52.100.000		57.400.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	20	2	38.500.000	2	43.000.000	2	47.300.000	2	52.100.000	2	57.400.000		
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				55.000.000		61.000.000		67.100.000		73.900.000		81.300.000		
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	20	1	55.000.000	1	61.000.000	1	67.100.000	1	73.900.000	1	81.300.000		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				600.000.000		625.000.000		650.000.000		675.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	305	110	600.000.000	110	625.000.000	110	650.000.000	110	675.000.000	110	700.000.000		

4.4 **Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.**

Untuk Mendukung Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melalui Program Program berikut :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)
			2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
2.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	(PU.15) Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA STRATEGIS PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.	Indeks Desa	Indeks	0,78191	0,7810	0,7812	0,7814	0,7816	0,7818	0,7820	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RENCANA STRATEGIS PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.	Persentase Desa Mandiri		%	29.92	45,5	47,3	49,2	51	53	54.9	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI